



BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Barito Kuala masih rendah karena pola makan masyarakat masih belum beragam, bergizi seimbang dan masih didominasi bahan makan berupa beras
- b) Penanganan distribusi pangan melalui program penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dalam rangka stabilitas harga belum optimal dan memadai, karena penempatan PLDPM belum merata
- c) Pengawasan keamanan pangan belum optimal, terutama untuk komoditi pangan segar berupa sayuran dan buah buahan
- d) Pencapaian penanganan kerawanan pangan masih belum optimal akibat kurangnya sumberdaya manusia
- e) Penguatan kelembagaan lumbung pangan dan perluasan desa mandiri pangan masih belum maksimal
- f) Kualitas SDM masih rendah, sehingga teknologi usaha perikanan belum bisa dikuasai sepenuhnya
- g) Lemahnya permodalan merupakan masalah klasik belum bisa terpecahkan secara tuntas. Disisi lain lembaga perkreditan/perbankan



- kurang berminat menyalurkan kredit, karena usaha perikanan dinilai berisiko tinggi
- h) Tumpang tindih pemanfaatan lahan yang terus terjadi, sebagai akibat dari belum optimalnya penyusunan tata ruang dan pengendaliannya.
 - i) Degradasi sumberdaya perikanan karena eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan maupun dampak dari kegiatan lain, misalnya adanya perkebunan sawit, stockfile batu bara.
 - j) Mutu produk olahan perikanan yang memiliki mutu rendah sehingga bernilai jual rendah.
 - k) Perubahan musim yang tidak menentu akibat dari global warming effect (pemanasan global) yang sangat merugikan bagi pembudidaya dan nelayan.
 - l) Mulai dilaksanakannya AFTA sebagai wujud diawalinya liberalisasi investasi dan perdagangan global (APEC 2010 dan WTO 2020). Sebagai indikasi, saat ini makin meningkatnya akses produk-produk asing terhadap pasar dalam negeri sebagai konsekuensi pelaksanaan perdagangan bebas. Hal ini menyebabkan persaingan produk-produk perikanan yang semakin ketat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi didefinisikan sebagai cara pandang yang jauh ke depan yang bermakna bagaimana memprediksi masa depan sebagai hal yang krusial untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Visi yang



tertuang di dalam RPJMD ini merupakan visi misi jangka menengah Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 20122 adalah :

**" TERWUUDNYA KABUPATEN BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA
MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA**

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditempuh melalui 4 (empat)

Misi yaitu :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumberdaya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator



kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati keempat misi pembangunan daerah, peran ketahanan pangan dan perikanan dominan pada misi kedua dengan target ketersediaan pangan daerah dan peningkatan produksi perikanan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi dinas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan Dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.



3.3.1 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pertanian

Tabel 3.3.1 Hasil Telaahan terhadap Renstra K/L (Kementerian/Lembaga)

No	Isu Strategis K/L	Program Prioritas K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim.	Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.	Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global	Revitalisasi lingkungan dan penerapan teknologi ramah lingkungan
2.	Keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air	Peningkatan diversifikasi pangan masyarakat.	Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air	Revitalisasi infrastruktur pertanian
3.	Kecilnya status dan luas penggunaan lahan serta tekanan degradasi dan alih fungsi lahan	Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor.	Status dan luas lahan kepemilikan lahan petani sangat terbatas	Tata ruang lahan pertanian
4.	Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi.	Peningkatan kesejahteraan petani (Ketersediaan pangan)	Kondisi iklim yang tidak menentu mempengaruhi proses produksi, ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan	Tersedianya potensi sumber daya alam dalam rangka pengembangan ketersediaan pangan
5.	Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik.	Peningkatan Konsumsi pangan lokal	Masih kurangnya pengetahuan, kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam,	Berkembangnya industri dan teknologi pengolahan pangan serta potensi masyarakat yang telah mampu memproduksi, mengolah dan



No	Isu Strategis K/L	Program Prioritas K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	mengonsumsi pangan lokal
6.	Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Peningkatan kesejahteraan petani (Distribusi pangan/stabilitas harga)	Terjadinya gagal panen akibat dari gangguan musim, bencana alam, serangan hama penyakit dan lainnya yang dapat mengakibatkan menurunnya produksi pangan	Adanya standarisasi harga pangan strategis bagi para pelaku distribusi pangan dan adanya kerja sama antar lembaga pemasaran dalam rangka pengendalian harga pangan

3.3.2 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

VISI KKP adalah **“Mewujudkan Sektor Kelautan Dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat Dan Berbasis Kepentingan Nasional”**

MISI untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah :

- 1. Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 36



dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan

2. **Keberlanjutan (sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

✚ **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

✚ **Keberlanjutan (sustainability)**, yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

✚ **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan



Arah Kebijakan dan strategi KKP disusun dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pokok

a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi :

- Memberantas IUU Fishing
- Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi
- Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan

b. Membangun prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi :

- Mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut dan pesisir
- Mengelola sumberdaya ikan di 11 wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI)
- Mengendalikan sumberdaya perikanan tangkap
- Mengelola pemanfaatan perairan umum daratan (PUD)
- Membangun kemandirian dalam budidaya perikanan
- Meningkatkan sistem logistik hasil perikanan
- Meningkatkan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan
- Merehabilitasi ekosistem dan perlindungan lingkungan laut
- Membangun kemandirian pulau-pulau kecil



- c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :
- Memberi perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam
 - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan
 - Meningkatkan usaha dan investasi kelautan dan perikanan
 - Meningkatkan kompetensi masyarakat KP melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
 - Mengembangkan inovasi IPTEK bidang kelautan dan perikanan

2. Kebijakan Lintas Bidang

- a. Pengarusutamaan gender dibidang kelautan dan perikanan akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP
- b. Pembangunan kewilayahan akan dilaksanakan dengan strategi mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah
- c. Adaptasi perubahan iklim akan dilaksanakan dengan strategi
- Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - Peningkatan ketahanan masyarakat KP terhadap perubahan iklim
- d. Tata kelola pemerintahan yang baik, strategi dan langkah yang akan ditempuh adalah
- Membangun budaya kerja yang profesional
 - Meningkatkan kualitas pengawasan interna



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Berdasarkan hasil kajian KLHS, maka permasalahan pokok pada Kabupaten Barito Kuala adalah :

- a. Struktur ruang wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga rencana struktur berusaha mengangkat permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial.



- b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) belum optimal : Lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian/perikanan, perubahan kawasan lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan.
- c. Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), Kualitas air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum.
- d. Kondisi permukaan tanah rawa, tidak memungkinkan pengolahan limbah domestic dengan baik, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan.
- e. Pelayanan transportasi public masih rendah.
- f. Intensitas transportasi sungai yang tinggi di alur sungai barito, khususnya transportasi angkutan batu bara berpotensi menurunkan kualitas cagar alam Pulau Bakut, Pulau Kaget dan Pulau Kembang (limbah batu bara, bbm kapal, penggerusan, pengaruh negative terhadap flora dan fauna yang di lindungi).
- g. Kuantitas dan kualitas prasarana perkotaan masih relative rendah terutama pada persampahan, jaringan litrik, drainase, air bersih, limbah dan sanitasi.



- h. Perlunya pengembangan dan perencanaan induk (masterplan) ekonomi pembangunan kabupaten barito kuala; untuk mengakomodasi isu globalisasi dan pasar terbuka, serta Persaingan ekonomi regional. Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang belum ada, angka pengangguran yang relative tinggi, dan potensi Kepariwisataan belum berkembang secara optimal.
- i. Persebaran Penduduk yang tidak merata dan Pertumbuhan Penduduk rendah, bahkan cenderung berkurang di beberapa wilayah tertinggi, terjadinya proses migrasi keluar dan urbanisasi.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Barito Kuala berdasarkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 - 2031, terdiri atas :

- a. Pengembangan system permukiman yang hirarki dan terpadu antara system perdesaan dan perkotaan sebagai satu kesatuan system baik kabupaten maupun provinsi
- b. Pengembangan system prasarana wilayah meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu dalam mendorong pertumbuhan wilayah
- c. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan 6 kawasan lindung sesuai fungsi masing masing
- d. Pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan terbentuknya agroindustri



- e. Pengembangan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai
- f. Pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap
- g. Pengembangan kawasan strategis kabupaten
- h. Pemeliharaan dan pemulihan kawasan lindung
- i. Pengembangan kawasan industri, perdagangan dan jasa
- j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten / kota yaitu perkotaan Marabahan.

Pusat Kegiatan Local Promosi yang selanjutnya disebut dengan PKLP adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL yaitu perkotaan Alalak, Perkotaan Tabunganen, Perkotaan Anjir Pasar, Perkotaan Tabukan.

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa terdiri atas :

- a. Kawasan Perkotaan Kuripan di kecamatan Kuripan
- b. Kawasan Perkotaan Bakumpai di kecamatan Bakumpai
- c. Kawasan Perkotaan Wanaraya di kecamatan Wanaraya
- d. Kawasan Perkotaan Barambai di kecamatan Barambai



- e. Kawasan Perkotaan Rantau Badauh di kecamatan Rantau Badauh
- f. Kawasan Perkotaan Cerbon di kecamatan Cerbon
- g. Kawasan Perkotaan Jejangkit di kecamatan Jejangkit
- h. Kawasan Perkotaan Mandastana di kecamatan Mandastana
- i. Kawasan Perkotaan Belawang di kecamatan Belawang
- j. Kawasan Perkotaan Anjir Muara di kecamatan Anjir Muara
- k. Kawasan Perkotaan Tamban di kecamatan Tamban
- l. Kawasan Perkotaan Mekarsari di kecamatan Mekarsari

Penentuan lokasi setiap kegiatan teknis Ketahanan Pangan dan Perikanan pada Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017 – 2022 sesuai dengan lokasi Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.

3.5 Penentuan Isu-Isu strategis

Dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dirumuskan sbb :

- a) Belum optimalnya stok cadangan pangan dan distribusi pangan serta minimnya ketersediaan produk pangan
- b) Belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat
- c) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya sektor perikanan

